

PEMERINTAH KABUPATEN PASER



***LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
DAN PERJANJIAN KINERJA***

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASER**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Terdorong oleh keinginan dan kesadaran untuk maju dan mengejar ketertinggalan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Paser khususnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu adanya niat dan tekad serta keikhlasan dari seluruh komponen organisasi untuk bekerja dengan baik dan bertanggung jawab.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dibuat dan disusun Laporan Kinerja tahun 2023 sebagai wujud Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan dan Sipil.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dirasakan belum sepenuhnya memenuhi harapan sebagai mana dalam Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, namun demikian diharapkan Laporan Kinerja yang telah kami susun ini dapat memberikan gambaran kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan semoga bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Tanah Grogot, Februari 2025



Kepala,

Mohd. Ismail Yanuardi, S. Hut. MM
NIP. 197001051998031010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang tertuang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai bentuk pertanggung jawaban instansi pemerintah kepada masyarakat/publik/stake holder dan sejauh mana aspirasi masyarakat sudah terpenuhi. Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelumnya wajib menyusun Rencana Strategis dimana didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Demikian pula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser yang merupakan salah satu instansi pemerintah telah juga menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tahun 2024.

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tahun 2024 telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah tertuang pada laporan ini.

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah: Meningkatkan Pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan Sasaran yang hendak dicapai adalah: Meningkatnya Pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam pencapaian sasaran beberapa kegiatan telah menunjukkan pencapaian yang mengembirakan, namun ada kegiatan yang belum mencapai sasaran yang diharapkan.

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kependudukan dan Pencatatan sipil pada tahun 2024 telah dilaksanakan 5 (Lima) program dengan 14 (Empat Belas) kegiatan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 11.242.777.850,- dan serapan anggaran sebesar Rp. 10.416.876.168,- atau terealisasi sebesar 87,40%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan Pelaporan Kinerja.....	1
C. Isu Strategis.....	2
D. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	5
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	12
B. Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV PENUTUP.....	33
LAMPIRAN.....	34
1. Perjanjian Kerja	
2. Rencana Aksi	
3. Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2024	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap akhir periode tahun anggaran instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut dilaporkan dalam Laporan Kinerja.

Mengacu pada ketentuan tersebut diatas, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dan akuntabel, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser menyusun Laporan Kinerja.

Laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam laporan ini disajikan informasi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai atas penggunaan anggaran.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja Tahun 2024.
2. Perbaiki dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dimasa yang akan datang.
3. Mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan dan penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2024.
4. Memberikan informasi tentang sejauhmana penentuan prinsip-prinsip good governance dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2024.

C. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses akan terjadi tentang kependudukan. Permasalahan mendesak terkait dengan kependudukan Kabupaten Paser yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tidak terlepas dari isu-isu pembangunan pada pemerintah Kabupaten Paser. Berdasarkan isu-isu pembangunan Kabupaten Paser maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab membantu Bupati Paser di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dapat diidentifikasi Isu Strategis sebagai berikut:

Tabel 1.1
Identifikasi Isu-isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan

No	Isu dan Masalah Strategis Pembangunan		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kab/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penerapan E-KTP Nasional	Penerapan E-KTP Nasional	Penerapan E-KTP Nasional Berbasis NIK
3.	Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Koordinasi, Supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	Cakupan registrasi penduduk dan pencatatan sipil
4.	Pembentukan database kependudukan	Pelaporan data hasil SIAK dan data registrasi	Ketersediaan pengembangan infrastruktur SIAK dan database kependudukan yang valid dan akurat

D. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana lampiran dokumen ini. Sedangkan susunan organisasi Dinas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - 1) Seksi Identitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - 3) Seksi Pendataan Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil, membawahi :
 - 1) Seksi Perkawinan dan Perceraian;

- 2) Seksi Kelahiran dan Kematian;
- 3) Seksi Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi:
 - 1) Seksi Sistem Informasi administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - 3) Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan komunikasi
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi:
 - 1) Seksi Kerjasama;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - 3) Seksi Inovasi Pelayanan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- b. Penetapan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi Kependudukan, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pembinaan dan Pengendalian penduduk sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil meliputi pelayanan:

- 1) KTP WNI
- 2) KTP WNA
- 3) SKTT
- 4) Akta Perkawinan
- 5) Akta Perkawinan yang terlambat pelaporan
- 6) Akta Perceraian
- 7) Akta Perceraian yang terlambat pelaporan
- 8) Kutipan Kedua Akta Perkawinan
- 9) Kutipan Kedua Akta Perceraian
- 10) Surat Keterangan Pindah
- 11) Akta Pengakuan Anak
- 12) Akta Pengesahan Anak
- 13) Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak
- 14) Kutipan Kedua Akta Pengesahan Anak
- 15) Akta Pengangkatan Anak
- 16) Akta Pengangkatan Anak yang melebihi waktu pelaporan
- 17) Surat Keterangan Perubahan Nama
- 18) Salinan Akta Perkawinan
- 19) Salinan Akta Perceraian
- 20) Salinan Akta Kematian
- 21) Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
- 22) Surat Keterangan Pelaporan dan Tanda Bukti pelaporan mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian yang terjadi di luar negeri
- 23) Surat Keterangan Kependudukan

Sedangkan jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sebagai mana tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah PNS Disdukcapil Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2024.

Golongan Pendidikan	Es I	Es II	Es III	Es IV	Jumlah
1. SD	-	-	-	-	-
2. SLTP	-	-	-	-	-
3. SLTA	-	-	-	10	10
4. D III	-	-	-	4	4
5. S – 1	-	-	10	5	15
6. S – 2	-	1	1	1	3
Jumlah	-	1	11	20	33

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Disdukcapil Berdasarkan Eselon Tahun 2024

Tingkatan Eselon	Jumlah	Keterangan
Eselon II B	1	Kepala Dinas
Eselon III A	1	Sekretaris
Eselon III B	3	Ka.Bidang
Eselon IV A	2	Ka.Sub.Bagian
Non Eselon PNS	26	Staf Pelaksana
Pegawai Tidak Tetap	45	Honorer
Jumlah	78	Personil

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Disdukcapil Kabupaten Paser adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026, sehubungan dengan tugas dan fungsi Disdukcapil dengan mempertimbangan lingkungan strategis. Rencana Strategis Disdukcapil Kabupaten Paser merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021-2026:

Misi ke-2	Tujuan ke-1	Sasaran ke-2
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

1. Tujuan dan indikator Rencana Strategis Disdukcapil Kabupaten Paser

Sejalan dengan hal itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan **Tujuan** Perangkat Daerah yang merupakan jawaban atas isu-isu strategis dan alasan strategis yang akan dicapai pada jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang ada 2 (dua) tujuan, yaitu:

“Meningkatkan Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser”

Dan menetapkan indikator tujuan dalam Rencana Strategis Disdukcapil Kabupaten Paser adalah:

“Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan”

2. Sasaran dan indikator sasaran Rencana Strategis Disdukcapil Kabupaten Paser

Tujuan Perangkat Daerah ini selanjutnya diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022-2026, yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
Dengan indikator sasaran 1: Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP),
Indikator sasaran 2: Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian).
2. Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan;
Dengan indikator sasaran 1: Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;
Dengan indikator sasaran 1: Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK,
Indikator sasaran 2: Penilaian SAKIP.

Berikut disajikan hubungan tujuan dan sasaran yang adakan dilaksanakan oleh Disdukcapil:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disdukcapil Kabuapeten Paser

Misi/Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026	
TUJUAN 1: Meningkatkan Penataan dan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	N/A (Belum pernah diukur)	80	81	82	83	84	84
SASARAN 1: Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	50	2	2	2	2	2	2
	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)		1	1	1	1	1	1
SASARAN 2: Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan		10	15	20	25	30	30
TUJUAN 2: Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang responsif dan tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	N/A (Belum pernah diukur)	65	72	74	76	80	80
SASARAN 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK	0	0	0	0	0	0	0
	Penilaian SAKIP		61 (B)	65 (B)	70 (BB)	75 (BB)	81 (A)	81 (A)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan di dalam Renja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja beserta targetnya yang dijabarkan pertahun. Indikator Kinerja tersebut seluruhnya bersifat outcome yang sangat dipengaruhi oleh pihak eksternal. Demikian pula dengan target yang ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan bersama dengan seluruh Bidang pengampu melalui Rapat Internal.

Dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut, Disdukcapil Kabupaten Paser menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategisnya. Penetapan IKU yang mengacu pada Renstra Disdukcapil tahun 2022-2026. IKU Disdukcapil Kabupaten Paser yang akan digunakan dengan target kinerja yang ingin dicapai Disdukcapil Kabupaten Paser Tahun 2023 yang merupakan juga perjanjian kinerja Disdukcapil adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Disdukcapil Kabupaten Paser mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp. 11.918.777.750,00 yang digunakan untuk melaksanakan 14 Kegiatan dan 5 Program yang tercantum pada Perjanjian Kinerja berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkannya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.Rata rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA, dan KTP) 2.Rata-rata waktu penyelesaian dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta pengangkatan anak, akta kematian,akta perkawinan/perceraian	2 jam 1 jam
2.	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	1.Persentase lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan	20%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Penilaian SAKIP	70 (B)

PROGRAM/KEGIATAN**Program Pendaftaran Penduduk**

Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 470.383.600,-	
Kegiatan Penataan Pendaftaran penduduk	Rp. 100.000.000,-	
Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	Rp. 15.000.000,-	
Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Penduduk	Rp. 50.000.000,-	

ANGGARAN**Rp. 635.383.600,-****KET.**

APBD

Program Pencatatan Sipil

Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp. 243.050.000,-	
Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp. 33.000.000,-	

Rp. 276.050.000,-

APBD

Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp. 2.037.580.220,-	
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminduk	Rp. 143.230.520,-	

Rp. 2.240.810.740,-

APBD

Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan penyajian Data Kependudukan	Rp. 28.000.000,-	
--	------------------	--

Rp. 28.000.000,-

APBD

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi PD	Rp. 215.000.000,-	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.398.626.420,-	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 961.306.990,-	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp. 163.800.000,-	

Rp. 8.787.733.410,-

APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran pencapaian kinerja ini bertujuan untuk menilai keberhasilan sebuah organisasi. Pengukuran pencapaian target kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian IKU Disdukcapil Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2 Jam	2 Jam	100%	Sangat Tinggi	PIAK
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1 Jam	1 Jam	100%	Sangat Tinggi	PIAK
2	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	20%	15 OPD/Lembaga 35,71%	178,55%	Sangat Tinggi	PIAK
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK	0	0	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat
		Penilaian SAKIP	70 (BB)	60,31 (B)	86,15%	Tinggi	Sekretariat

Uraian penjelasan table:

- Sasaran kinerja Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diukur dengan 2 indikator. Indikator kinerja pertama yaitu Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP) dengan capaian kinerja 100% dari target yang di tetapkan 2 jam dengan realisasi 2 jam. Dan indikator kinerja kedua yaitu Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian) dengan capaian kinerja 100% dari target yang di tetapkan 1 jam dengan realisasi 1 jam. Dan Rata-rata capaian

- sasaran 1 kinerja 100%.
2. Sasaran Kinerja Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan diukur dengan indikator kinerja Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan dengan capaian kinerja 178,55% dari target yang di tetapkan 20% dengan realisasi 35,71%.
 3. Sasaran kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah diukur dengan 2 indikator. Indikator kinerja pertama yaitu Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK dengan capaian kinerja 100% dari target yang di tetapkan 0 Temuan dengan realisasi 0 Temuan. Dan indikator kedua yaitu Penilaian SAKIP dengan capaian kinerja 86,15% dengan target 70 (BB) dan realisasi 60,31 (B).

Perbandingan kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya diuraikan pada tahun berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2 Jam	2 Jam	100%	2 Jam	2 Jam	100%	2 Jam	2 Jam	100%
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1 Jam	1 Jam	100%	1 Jam	1 Jam	100%	1 Jam	1 Jam	100%
2	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	10%	14 OPD/Lembaga (34,14%)	341,14%	15%	19 OPD/Lembaga (46,34%)	308,93%	20%	15 OPD/Lembaga (35,71%)	178,55%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Penilaian SAKIP	61 (B)	B	n/a	65 (B)	60,58 (B)	99,31%	70 (BB)	60,31 (B)	86,15%

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser periode kelima diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2 Jam	2 Jam	100%	2 Jam	100%
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1 Jam	1 Jam	100%	1 Jam	100%
	Rata-rata capaian sasaran 1			100%			
2	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	20%	15 OPD/Lembaga (35,71%)	35,71%	30%	150%
		Rata-rata capaian sasaran 2			178,55%		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK	0	0	100%	0	100%
		Penilaian SAKIP	70 (BB)	60,31 (B)	86,15%	81 (A)	115,71%
	Rata-rata capaian sasaran 3			93,07%			

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser dengan realisasi kinerja tingkat provinsi dan nasional

Indikator Kinerja Sasaran	Kabupaten Paser	Provinsi	Nasional
Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2 Jam	n/a	n/a
Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1 Jam	n/a	n/a
Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	15 OPD/Lembaga	n/a	n/a
Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK	0	n/a	n/a
Penilaian SAKIP	60,31 (B)	n/a	n/a

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2 Jam	2 Jam	100%	Penyelesaian dokumen tepat waktu dan pelatihan/bimtek pada SDM Pelayanan	Memaksimalkan pelayanan dan penambahan SDM
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1 Jam	1 Jam	100%	Penyelesaian dokumen tepat waktu dan pelatihan/bimtek pada SDM Pelayanan	Memaksimalkan pelayanan dan penambahan SDM
2	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	20%	35,71%	178,55%	Menjalin sosialisasi dan Kerjasama dengan instansi atau Lembaga yang terkait	Memperpanjang masa kerjasama dengan instansi terkait
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK	0	0	0	Pelaporan penggunaan anggaran yang sesuai dengan target dan realisasi	Penggunaan anggaran sesuai target dan realisasi
		Penilaian SAKIP	70 (BB)	60,31 (B)	86,15%	Kurangnya data saat pengumpulan data SPIP	Melengkapi data-data dan laporan yang dibutuhkan

Uraian penjelasan table:

Dari lima indikator yang ada, realisasi capaian pada umumnya sudah mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena sudah melaksanakan secara rutin pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan upaya:

1. Memaksimalkan pelayanan dan penambahan SDM
2. Memperpanjang masa kerjasama dan sosialisasi dengan instansi terkait
3. Penggunaan anggaran sesuai target dan realisasi
4. Melengkapi data-data yang dibutuhkan.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Solusi yang dilakukan		
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	100%	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	99,64%	Memaksimalkan pelayanan dan penambahan SDM		
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	100%	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen kependudukan pelayanan pendaftaran penduduk	66,67%			
				Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen penataan pendaftaran penduduk	86,72%			
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%			
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%			
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	109,53%	Memaksimalkan pelayanan dan penambahan SDM		
				Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	100%			
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	100%					
		2	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	35,71%	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid	100%	Memperpanjang masa kerjasama dengan instansi terkait

				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah dokumen/laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	83,33%	
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen/laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100%	
				Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase laporan profil kependudukan	100%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK	99,38%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	99,38%	Memenuhi kebutuhan-kebutuhan fasilitas kantor oleh secretariat
		Penilaian SAKIP		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	97,50%	Penggunaan anggaran sesuai target dan realisasi
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	100%	Melengkapi data-data laporan yang dibutuhkan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada bagian sekretariat
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	100%	Melakukan pemeliharaan barang inventaris kantor

Uraian penjelasan table:

Dari lima indikator yang ada, realisasi capaian pada umumnya sudah mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena sudah melaksanakan secara rutin pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan upaya:

1. Memaksimalkan pelayanan dan penambahan SDM.
2. Menjalin kerjasama dan sosialisasi dengan instansi terkait.
3. Penggunaan anggaran sesuai target dan realisasi.
4. Melengkapi data-data yang dibutuhkan.

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2024
Tabel 3.7
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada table berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi			Efisiensi
							Alokasi Anggaran	Anggaran	(%)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
I.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen Kependudukan (KK, KTP, KIA)	2 jam	2 jam	100%	635.383.600,00	574.440.991,00	90,41	60.942.609,00
			Rata-rata waktu penyelesaian dokumen Pencatatan Sipil (Akte Kelahiran, Kematian, Pengangkatan Anak, Perkawinan/Perceraian)	1 Jam	1 Jam	100%	276.050.000,00	233.653.620,00	84,64	60.942.609,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	97%	99,46%	102,54 %	635.383.600,00	574.440.991,00	90,41	60.942.609,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	97%	109,53%	112,92 %	276.050.000,00	233.653.620,00	84,64	42.396.380,00
II.	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan		Persentase lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	20%	35,71%	178,55 %	2.269.610.740,00	2.219.897.481,00	97,81	49.713.259,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid	97%	100%	103,09 %	2.240.810.740,00	2.191.200.589,00	97,79	49.610.151,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100%	178,55%	178,55 %	28.800.000,00	28.696.892,00	99,64	103.108,00

III.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Penilaian SAKIP	70,01%	60,31 (B)	86,15%				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	74%	99,38%	134,29 %	8.737.733.410,00	7.388.884.079,00	84,56	1.348.849.331,00

Sumber: Laporan Evaluasi Renja TW IV
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

Uraian penjelasan table:

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa dari realisasi yang didapat tiap sasaran yang rata-rata sudah diatas 50% bahkan ada realisasi sasaran yang melebihi target, tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tetap bisa menghemat penggunaan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi anggaran ada yang tidak mencapai 100%.

A. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2024 dialokasikan Dana Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Anggaran Belanja Langsung (BL) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser sebagaimana tertuang Dalam DPA-OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, dengan realisasi keuangan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Keuangan Disdukcapil Tahun 2024

NO	Program/Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa Dana	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6
02.00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
02.12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 11.918.777.750,00	Rp 10.416.876.168,00	Rp 1.501.901.582,00	87,40
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.737.733.410,00	Rp 7.388.884.079,00	Rp 1.348.849.331,00	84,56
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 215.000.000,00	Rp 208.335.129,00	Rp 6.664.871,00	96,90
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 55.000.000,00	Rp 54.953.390,00	Rp 46.610,00	99,92
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 60.000.000,00	Rp 56.327.510,00	Rp 3.672.490,00	93,88
2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 50.000.000,00	Rp 49.174.999,00	Rp 825.001,00	98,35
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 50.000.000,00	Rp 47.879.230,00	Rp 2.120.770,00	95,76
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 7.397.626.420,00	Rp 6.120.318.240,00	Rp 1.277.308.180,00	82,73
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 7.036.097.716,00	Rp 5.790.759.695,00	Rp 1.245.338.021,00	82,30
2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 361.528.704,00	Rp 329.558.545,00	Rp 31.970.159,00	91,16
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 961.306.990,00	Rp 911.930.710,00	Rp 49.376.280,00	94,86
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 140.531.600,00	Rp 127.812.800,00	Rp 12.718.800,00	90,95
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 105.000.000,00	Rp 89.091.100,00	Rp 15.908.900,00	84,85

2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 425.927.740,00	Rp 405.657.600,00	Rp 20.270.140,00	95,24
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 22.347.650,00	Rp 22.251.700,00	Rp 95.950,00	99,57
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 267.500.000,00	Rp 267.117.510,00	Rp 382.490,00	99,86
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 163.800.000,00	Rp 148.300.000,00	Rp 15.500.000,00	90,54
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 45.000.000,00	Rp 40.060.000,00	Rp 4.940.000,00	89,02
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 118.800.000,00	Rp 108.240.000,00	Rp 10.560.000,00	91,11
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 635.383.600,00	Rp 574.440.991,00	Rp 60.942.609,00	90,41
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 470.383.600,00	Rp 424.398.462,00	Rp 45.985.138,00	90,22
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Rp 15.000.000,00	Rp 14.836.000,00	Rp 164.000,00	98,91
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Rp 440.383.600,00	Rp 409.562.462,00	Rp 30.821.138,00	93,00
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hal Laporan Peristiwa Kependudukan	Rp 15.000.000,00	Rp -	Rp 15.000.000,00	-
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Rp 100.000.000,00	Rp 86.723.800,00	Rp 13.276.200,00	86,72
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Rp 100.000.000,00	Rp 86.723.800,00	Rp 13.276.200,00	86,72
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp 15.000.000,00	Rp 14.468.000,00	Rp 532.000,00	96,45
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Rp 15.000.000,00	Rp 14.468.000,00	Rp 532.000,00	96,45
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp 50.000.000,00	Rp 48.850.729,00	Rp 1.149.271,00	97,70
2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Rp 50.000.000,00	Rp 48.850.729,00	Rp 1.149.271,00	97,70
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp 276.050.000,00	Rp 233.653.620,00	Rp 42.396.380,00	84,64
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp 243.050.000,00	Rp 205.532.020,00	Rp 37.517.980,00	84,56

2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Rp 243.050.000,00	Rp 205.532.020,00	Rp 37.517.980,00	84,56
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp 33.000.000,00	Rp 28.121.600,00	Rp 4.878.400,00	85,22
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Rp 15.000.000,00	Rp 14.911.600,00	Rp 88.400,00	99,41
2.12.03.2.02.0009	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Rp 18.000.000,00	Rp 13.210.000,00	Rp 4.790.000,00	73,39
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp 2.240.810.740,00	Rp 2.191.200.586,00	Rp 49.610.154,00	97,79
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp 2.037.580.220,00	Rp 1.988.565.508,00	Rp 49.014.712,00	97,59
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp 2.037.580.220,00	Rp 1.988.565.508,00	Rp 49.014.712,00	97,59
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 143.230.520,00	Rp 142.905.194,00	Rp 325.326,00	99,77
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 71.400.000,00	Rp 71.140.994,00	Rp 259.006,00	99,64
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 51.830.520,00	Rp 51.829.400,00	Rp 1.120,00	100,00
2.12.04.2.03.0006	Kerja sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Rp 20.000.000,00	Rp 19.934.800,00	Rp 65.200,00	99,67
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 60.000.000,00	Rp 59.729.884,00	Rp 270.116,00	99,55
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Rp 60.000.000,00	Rp 59.729.884,00	Rp 270.116,00	99,55
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp 28.800.000,00	Rp 28.696.892,00	Rp 28.696.892,00	99,64
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Rp 28.800.000,00	Rp 28.696.892,00	Rp 28.696.892,00	99,64
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Rp 28.800.000,00	Rp 28.696.892,00	Rp 28.696.892,00	99,64
JUMLAH		Rp 11.918.777.750,00	Rp 10.416.876.168,00	Rp 1.501.901.582,00	87,4

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser selama tahun 2024.

Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat solusi langkah-langkah perbaikan dimasa mendatang untuk meningkatkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran sesuai dengan program-program dan kegiatan hingga sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan rata-rata capaian kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mencapai/melampaui target dengan analisis keberhasilan dari masing-masing indikator sasaran, maka solusi yang dilakukan adalah memaksimalkan pelayanan dan penambahan SDM, memperpanjang masa Kerjasama dengan instansi terkait, penggunaan anggaran sesuai target dan realisasi, dan melengkapi data-data dan laporan yang dibutuhkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2024.

Tanah Grogot, Februari 2025

Kepala,

Mohd. Ismail Yanuardi, S. Hut. MM
NIP. 197001051998031010

LAMPIRAN

I. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mohd. Isnaini Yanuardi, S. Hut. MM**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten P:aser
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
Nama : **dr. Fahmi Fadli**
Jabatan : Bupati Paser
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan Supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Tana Paser, 25 Nopember 2024

**PIHAK PERKEDUA
BUPATI PASER**

dr. FAHMI FADLI

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PASER**

MOHD. ISNAINI YANUARDI, S.Hut. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197001051998031010

**LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkannya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Rata rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KTP, KIA)	2 jam
		2 Rata-rata waktu penyelesaian dokumen Pencatatan Sipil (akta kematian, pengakatan)	1 jam
2	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	1 Persentase Data Kependudukan yang Valid	20%
		2 Persentase lembaga Yg Memanfaatkan Datas Kependudukan	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Penilaian SAKIP	70,01

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp. 635,383,600	APBD
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 470,383,600	
Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Rp. 100,000,000	
Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp. 15,000,000	
Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Penduduk	Rp. 50,000,000	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp. 276,050,000	APBD
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp. 243,050,000	
Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp. 33,000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp. 2,208,810,740	APBD
Kegiatan pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan penyajian data Kependudukan	Rp. 2,037,580,220	
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 143,230,520	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp. 28,000,000	APBD
Kegiatan pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Data Kependudukan	Rp. 28,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 8,738,733,410	APBD
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Rp. 215,000,000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7,398,626,420	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 961,306,990	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 163,800,000	

Tana Paser, 25 Nopember 2024

**PIHAK KEDUA
BUPATI PASER**



dr. FAHMI FADLI

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER**



MOHD. ISNAINI YANUARDI, S.Hut. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197001051998031010

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
2024

1. Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran tersebut ialah meningkatkan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja memiliki empat Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase Rasio Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KIA, KTP, KK)	Persentase Rasio Dokumen Kependudukan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) usia dibawah 0-17 tahun, kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) usia di atas 17 tahun, kepemilikan Kartu Keluarga (KK) wajib bagi masyarakat yang sudah menikah dan menanggung keluarga sebagai bagian dari kepala keluarga, kepemilikan ini menjadi indikator bagi pemerintah yang mewajibkan bagi warga wajib memiliki identitas diri.	Jumlah penduduk yang <u>memiliki dokumen kependudukan</u> Jumlah Penduduk Keseluruhan X 100%	Dari Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.	Persentase rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akta : kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian)	Persentase rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil atas kepemilikan akta kelahiran dan akta kelahiran anak, kepemilikan akta kematian, kepemilikan akta pernikahan dan perceraian dan ini memberikan indikasi sangat penting mengenai kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat	Jumlah Penduduk Yang <u>Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil</u> Jumlah Penduduk Keseluruhan X 100%	Dari Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
3.	Persentase Data Kependudukan yang Valid	Persentase Data Kependudukan yang valid dapat memberikan indikasi penting mengenai informasi administrasi kependudukan yang sebenarnya sehingga data yang di informasikan dapat diterima dan dipahami sehingga bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan informasi adminduk.	Jumlah Data Penduduk Yg di <u>Update</u> Jumlah Penduduk Keseluruhan X 100%	Dari Bidang Pengelolaan Informasi Adminduk
4.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan, memberikan indikasi dapat meningkatkan kerjasama dengan Instansi/ lembaga/ organisasi masyarakat dalam pemanfaatan data kependudukan, sehingga meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelaporan data kependudukan	Jumlah PD Yang <u>Memanfaatkan Data</u> Jumlah Perangkat Daerah X 100%	Dari Bidang Pengelolaan Informasi Adminduk

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap Indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KIA, KTP)	97%	Pada tahun 2024 target yang direncanakan sesuai Renstra sebanyak 40.150 keping atau blanko, realisasi sampai dengan saat ini sebanyak 48.436 atau sebesar 120,64%
Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	97%	Capaian sampai dengan saat ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Akta lahir sebanyak 4561 atau sebesar 80% - Akta kematian sebanyak 2847 atau sebesar 95% - Capaian arsip digital sebanyak 8861 atau sebesar 90% , secara keseluruhan sebesar 88,33%
Persentase data kependudukan yang valid	97%	Untuk mendukung tertib administrasi kependudukan tertib administrasi pelayanan publik maka terwujudnya database kependudukan yang valid sebagai dasar pemberian NIK kepada setiap penduduk
Persentase pemanfaatan data kependudukan	100%	Pemanfaatan data kependudukan bagi PD yang melakukan kerjasama sebanyak 24 PD dari target 41 PD atau sebesar 58%
Penilaian SAKIP	70.01 (BB)	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 mencapai 86,17%, kategorie B dari target Nilai 70,01. BB

Rencana Aksi Disdukcapil Kab. Paser 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Target	Rencana Program/Kegiatan				Anggaran	Penanggung Jawab
						T1	T2	T3	T4		
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat	Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	100%	25%	25%	25%	25%	Rp 8.737.733.410	Sekretaris
		Penilaian SAKIP									
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	100%	10%	5%	35%	50%	Rp 215.000.000		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	√	√	√	√	Rp 55.000.000		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen			√	√	Rp 60.000.000		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			√	√	Rp 50.000.000		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	√			√	Rp 50.000.000		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	100%	25%	25%	25%	25%	Rp 7.397.626.420		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	33 ASN/12 Bulan	√	√	√	√	Rp 7.036.097.716		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	60 laporan	√	√	√	√	Rp 361.528.704		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan	100%	15%	35%	35%	15%	Rp 961.306.990		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan mesin	15		√			Rp 140.531.600		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20		√			Rp 105.000.000		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Perlengkapan Kebersihan	100			√		Rp 425.927.740		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	25			√		Rp 22.347.650		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumla Perjalanan Dinas dan Rapat Kordinasi	60	√	√	√	√	Rp 267.500.000		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		√	√	√	√	Rp 260.000		
		3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	45%			20%	25%	Rp 163.800.000		

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Operasional Yang Dipelihara	4			√		Rp 45.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100			√		Rp 118.800.000	
2.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	97%	24%	24%	24%	95%	Rp 735.383.600	Kabid Kependudukan
			1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen kependudukan pelayanan pendaftaran penduduk	97%	24%	24%	24%	25%	Rp 470.383.600	
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	100%	√	√	√	√	Rp 15.000.000	
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	8000 Dokumen	√	√	√	√	Rp 440.383.600	
			Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 Dokumen	√	√	√	√	Rp 15.000.000	
			Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen penataan pendaftaran penduduk	97%	24%	24%	24%	25%	Rp 100,000,000	
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000 Dokumen	√	√	√	√	Rp 100,000,000	
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk	97%	24%	24%	24%	25%	Rp 15,000,000				
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	√	√	√	√	Rp 15,000,000				
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	97%	24%	24%	24%	25%	Rp 50,000,000				
Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	√	√	√	√	Rp 50,000,000				

		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/p erceraian)	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	97%	24%	24%	24%	95%	Rp	267.050.000	Kabid Pencatatan Sipil			
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya layanan Administrasi Kelahiran dan Kematian	97%	24%	24%	24%	25%	Rp	243.050.000				
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12000 akta	√	√	√	√	Rp	243.050.000				
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	97%	24%	24%	24%	25%	Rp	33,000,000				
			Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	50 Laporan	√	√	√	√	Rp	15.000.000				
			Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	50 Dokumen	√	√	√	√	Rp	18,000,000				
3.	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid	97%	24%	24%	24%	25%	Rp	2.240.810.740	Kabid PIAK			
			1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Jumlah Dokumen pengumpulan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	97%	24%	24%	24%	25%	Rp	2.037.580.220				
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	√	√	√	√	Rp	2.037.580.220				
						Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah dokumen/laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	97%	24%	24%	24%	25%	Rp	143.230.520	Kabid PDIP
						Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	√	√	√	√	Rp	71.400.000	
						Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	√	√	√	√	Rp	51,830,520	
						Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	1 Dokumen	√	√	√	√	Rp	20.000.000	

			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen/laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	97%	24%	24%	24%	25%	Rp 60,000,000	Kabid PIAK
			Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2 Laporan	v	v	v	v	Rp 60,000,000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100%	25%	25%	25%	25%	Rp 28,800,000	
			Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase laporan profil kependudukan	100%	25%	25%	25%	25%	Rp 28,800,000	
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	4 Dokumen	v	v	v	v	Rp 28,800,000	
JUMLAH										Rp. 11.918.777.750	

Tana Grogot, Februari 2024

Kepala,



Moht. Ismail Yanuardi, S. Hut. MM
NIP. 197001051998031010

I. LAPORAN EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TRIWULAN I-IV TAHUN 2024

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (TA 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
i	Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2	Jam	1.386.543.730	2	88.479.553	2	635.383.600	2	46.459.800	2	161.457.969	2	301.561.019	2	64.962.203	100	574.440.991	100	662.920.544	100	2.049.464.274	Bidang Pendaftaran Penduduk
			Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1	Jam	1.141.371.216	1	434.017.300	1	276.050.000	1	49.005.100	1	17.263.800	1	70.279.704	1	97.105.016	100	233.653.620	100	667.670.920	100	1.809.042.136	Bidang Pencatatan Sipil
ii	Sasaran 2: Meningkatkan Instansi Pengguna Data Kependudukan		Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	20	Persen	2.241.041.789	15	1.846.341.385	20	2.269.610.740	5	243.290.608	5	574.389.000	5	520.071.076	-	882.146.794	35,71	2.219.897.478	178,55	4.066.238.863	178,55	6.307.280.652	Bidang PIAK/PDIP
iii	Sasaran 3: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APID dan BPK	0	Temuan	8.865.000.000	0	8.416.096.334	0	8.737.733.410	0	1.064.171.709	0	2.107.642.012	0	1.562.767.912	0	2.654.302.446	0	7.388.884.079	0	15.804.980.413	0	24.669.980.413	Sekretariat
			Penilaian SAKIP	77 (BB)	Nilai	1.953.300.000	60,58 (B) 93,2 %	70 (BB)	60,31 (B)	-	-	-	60,31 (B)	86,15	179,00										
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	74	Persen	9.861.348.704	88	8.416.096.334	74	8.737.733.410	12	1.064.171.709	24	2.107.642.012	18	1.562.767.912	30	2.654.302.446	99,38	7.388.884.079	134,29	15.804.980.413	181%	160%	Sekretariat
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	100	Persen	446.600.000	100	166.171.309	100	215.000.000	10	22.180.400	4	8.094.000	37	79.309.760	46	98.750.969	97,50	208.335.129	97,50	374.506.438	98%	84%	Subbagian Perencanaan dan Program
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	110.000.000	1	86.256.849	10	55.000.000	4	7.190.000	1	8.094.000	2	12.188.000	3	27.481.390	10	54.953.390	100	141.210.239	1000%	128%	Subbagian Perencanaan dan Program
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	Dokumen	165.000.000	1	79.914.460	5	60.000.000	-	-	-	-	4	40.900.000	1	15.427.510	5	56.327.510	100	136.241.970	1000%	83%	Subbagian Perencanaan dan Program

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	21.600.000	-		10	50.000.000	-	-	-	4	26.221.760	5	22.953.239	9	49.174.999	90	49.174.999	4500%	228%	Subbagian Perencanaan dan Program	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	150.000.000	-	-	2	50.000.000	1	14.990.400	-	-	1	32.888.830	2	47.879.230	100	47.879.230	2000%	32%	Subbagian Perencanaan dan Program		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	100	Persen	8.737.748.704	93	8.079.256.900	100	7.397.626.420	13	984.030.267	28	2.069.940.927	18	1.362.678.026	23	1.703.669.020	100,00	6.120.318.240	100,00	14.199.575.140	100%	163%	Subbagian Keuangan
		Persentase LHP nihil	Persen																						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/Bulan	8.500.000.000	33	8.079.256.900	33	7.036.097.716	33	937.644.295	33	2.016.982.419	33	1.267.404.085	32	1.568.728.896	33	5.790.759.695	100,00	13.870.016.595	167%	163%	Subbagian Keuangan
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10	Dokumen	237.748.704	10	-	12	361.528.704	3	46.385.972	3	52.958.508	3	95.273.941	3	134.940.124	12	329.558.545	100	329.558.545	1000%	139%	Subbagian Keuangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase muatan rancangan awal Dokumen Perencanaan Daerah yang disetujui sebagai rancangan Akhir	100	Persen	577.000.000	78	165.418.125	100	961.306.990	6	53.442.242	2	22.427.085	12	116.874.926	75	719.186.457	100,00	911.930.710	100,00	1.077.348.835	100%	187%	Subbagian Umum
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	17.500.000	20	95.235.700	4	140.531.600	-	-	-	2	16.060.800	2	111.752.000	4	127.812.800	100	223.048.500	500%	1275%	Subbagian Umum	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	17.500.000	-	-	10	105.000.000	-	-	-	-	-	10	89.091.100	10	89.091.100	100	89.091.100	500%	509%	Subbagian Umum	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Paket	135.000.000	65	55.375.600	5	425.927.740	-	-	1	550.000	2	22.824.800	2	382.282.800	5	405.657.600	100	461.033.200	100%	342%	Subbagian Umum
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25	Paket	7.000.000	-	-	25	22.347.650	-	-	-	10	3.451.300	15	18.800.400	25	22.251.700	100	22.251.700	400%	318%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	400.000.000	50	14.806.825	60	267.500.000	15	53.442.242	15	21.877.085	15	74.538.026	15	117.260.157	60	267.117.510	100	281.924.335	167%	70%	Subbagian Umum
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	57	Persen	100.000.000	13	5.250.000	45	163.800.000	3	4.518.800	4	7.180.000	2	3.905.200	81	132.696.000	100,00	148.300.000	222,22	153.550.000	390%	154%	Subbagian Umum

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	85.000.000	3	5.250.000	4	45.000.000	2	4.518.800	-	-	1	3.905.200	1	31.636.000	4	40.060.000	100	45.310.000	2500%	53%	Subbagian Umum
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Unit	15.000.000	-	-	4	118.800.000	-	-	2	7.180.000	-	-	2	101.060.000	4	108.240.000	100	108.240.000	100%	722%	Subbagian Umum
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	97	Persen	441.734.400	73	88.479.553	97	635.383.600	7	46.459.800	25	161.457.969	47	301.561.019	10	64.962.203	99,46	574.440.991	102,54	662.920.544	106%	150%	Bidang Pendaftaran Penduduk
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen dan laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk	97	Persen	232.790.400	73	88.479.553	97	470.383.600	10	46.459.800	33	154.764.969	34	161.768.590	13	61.405.103	66,67	424.398.462	68,73	512.878.015	71%	220%	Bidang Pendaftaran Penduduk
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100	Dokumen	35.208.000	2	37.398.898	2	15.000.000	-	2.830.000	-	2.100.000	-	6.626.000	2	3.280.000	2	14.836.000	100	52.234.898	100%	148%	Bidang Pendaftaran Penduduk
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	8.000	Dokumen	144.000.000	8.000	51.080.655	8.000	440.383.600	2.000	43.629.800	1.000	152.664.969	2.000	155.142.590	3.000	58.125.103	8000	409.562.462	100	460.643.117	1%	320%	Bidang Pendaftaran Penduduk
		Penerbitan Dokumen Atas Hal Laporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2	Laporan	53.582.400	-	-	12	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0%	0%	Bidang Pendaftaran Penduduk
		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen penataan pendaftaran penduduk	97	Persen	3.024.000	-	-	97	100.000.000	-	-	-	-	87	86.723.800	-	-	100,00	86.723.800	103,09	86.723.800	106%	2868%	Bidang Pendaftaran Penduduk
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000	Dokumen	3.024.000	-	-	10000	100.000.000	-	-	-	-	10000	86.723.800	-	-	10000	86.723.800	100	86.723.800	1%	2868%	Bidang Pendaftaran Penduduk

		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk	97	Persen	61.920.000	-	-	97	15.000.000	-	-	45	6.693.000	52	7.775.000	-	-	100,00	14.468.000	103,09	14.468.000	106%	23%	Bidang Pendaftaran Penduduk
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2	Laporan	61.920.000	-	-	10	15.000.000	-	-	5	6.693.000	5	7.775.000	-	-	10	14.468.000	100	14.468.000	5000%	23%	Bidang Pendaftaran Penduduk
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	97	Persen	144.000.000	-	-	97	50.000.000	-	-	-	-	91	45.293.629	7	3.557.100	100,00	48.850.729	103,09	48.850.729	106%	34%	Bidang Pendaftaran Penduduk
		Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	144.000.000	-	-	1	50.000.000	-	-	-	-	-	45.293.629	1	3.557.100	1	48.850.729	100	48.850.729	10000%	34%	Bidang Pendaftaran Penduduk
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	97	Persen	444.555.216	99	434.017.300	97	276.050.000	18	49.005.100	6	17.263.800	25	70.279.704	35	97.105.016	109,53	233.653.620	112,92	667.670.920	116%	150%	Bidang Pencatatan Sipil
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	97	Dokumen	444.555.216	99	434.017.300	97	243.050.000	20	49.005.100	4	9.808.000	26	62.823.904	35	83.895.016	100,00	205.532.020	103,09	639.549.320	106%	144%	Bidang Pencatatan Sipil
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6000	Dokumen	444.555.216	6,000	434.017.300	6000	243.050.000	1.500	49.005.100	1.500	9.808.000	1.500	62.823.904	1.500	83.895.016	6000	205.532.020	100	639.549.320	2%	144%	Bidang Pencatatan Sipil
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	97	Persen	53.280.000	-	-	97	33.000.000	-	-	23	7.455.800	23	7.455.800	40	13.210.000	100,00	28.121.600	103,09	28.121.600	106%	53%	Bidang Pencatatan Sipil
		Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	50	Laporan	31.680.000	-	-	10	15.000.000	-	-	5	7.455.800	5	7.455.800	-	-	10	14.911.600	100	14.911.600	200%	47%	Bidang Pencatatan Sipil
		Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	5	Dokumen	21.600.000	-	-	5	18.000.000	-	-	-	-	-	-	5	13.210.000	5	13.210.000	100	13.210.000	2000%	61%	Bidang Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valids	97	Persen	1.371.811.536	89	1.846.341.385	97	2.240.810.740	11	243.290.608	26	574.389.000	22	494.059.184	39	879.461.794	100,00	2.191.200.586	103,09	4.037.541.971	106%	294%	Bidang PIAK/PDIP

		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase dokumen dan laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	97	Persen	1.184.334.912	93	1.720.077.580	97	2.037.580.220	12	243.290.608	28	562.195.000	18	367.950.400	40	815.129.500	100,00	1.988.565.508	103,09	3.708.643.088	106%	313%	Bidang PIAK
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	Dokumen	1.184.334.912	12	1.720.077.580	12	2.037.580.220	3	243.290.608	3	562.195.000	3	367.950.400	3	815.129.500	12	1.988.565.508	100	3.708.643.088	833%	313%	Bidang PIAK
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen dan laporan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	97	Persen	115.476.624	86	126.263.805	97	143.230.520	-	-	9	12.194.000	57	81.325.000	34	49.386.194	83,33	142.905.194	85,91	269.168.999	89%	233%	Bidang PDIP
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	Laporan	31.680.000	-	-	2	71.400.000	-	-	-	1.344.000	-	31.453.200	2	38.343.794	2	71.140.994	100	71.140.994	5000%	225%	Bidang PDIP
		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10	Laporan	62.196.624	10	81.883.500	2	51.830.520	-	-	-	10.850.000	1	40.979.400	-	-	1	51.829.400	50	133.712.900	500%	215%	Bidang PDIP
		Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	10	Dokumen	21.600.000	10	44.380.305	1	20.000.000	-	-	-	-	-	8.892.400	1	11.042.400	1	19.934.800	100	64.315.105	1000%	298%	Bidang PDIP
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen/laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	97	Persen	72.000.000	-	-	97	60.000.000	-	-	-	-	75	44.783.784	25	14.946.100	100,00	59.729.884	103,09	59.729.884	106%	83%	Bidang PIAK
		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2	Laporan	72.000.000	-	-	4	60.000.000	-	-	-	-	2	44.783.784	2	14.946.100	4	59.729.884	100	59.729.884	5000%	83%	Bidang PIAK
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100	persen	34.560.000	-	-	100	28.800.000	-	-	-	-	90	26.011.892	9	2.685.000	178,55	28.696.892	178,55	28.696.892	179%	83%	Bidang PIAK
		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase laporan profil kependudukan	100	Persen	34.560.000	-	-	100	28.800.000	-	-	-	-	90	26.011.892	9	2.685.000	100,00	28.696.892	100,00	28.696.892	100%	83%	Bidang PIAK
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	4	Dokumen	34.560.000	-	-	4	28.800.000	-	-	-	-	2	26.011.892	2	2.685.000	4	28.696.892	100	28.696.892	2500%	83%	Bidang PIAK

